

## RPP Sampah Harus Perkuat Daya Saing IKM

Penerapan regulasi pengelolaan sampah dikhawatirkan mendorong banjir produk kosmetik impor. Pasalnya, regulasi pengelolaan sampah tidak mengatur proses pemilahan dan daur ulang sampah bagi produsen dari luar negeri. Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Nuning S. Barwa mengatakan regulasi pengelolaan sampah memberatkan industri kosmetik domestic. "Hal itu lantaran, RPP Pengelolaan Sampah hanya mengatur kewajiban produsen lokal dan tidak mengatur produsen luar negeri," katanya di Jakarta, Kamis (13/10).

Menurut dia, RPP pengelolaan sampah perlu melihat kondisi industri kecil menengah agar lebih kompetitif dengan produk impor. "Industri kecil menengah memegang peranan saat krisis ekonomi beberapa waktu lalu dengan menampung pekerja ketika industri besar banyak yang tutup. Jika RPP Sampah ini diberlakukan, bukan tak mungkin industri rumahan bakal gulung tikar," katanya.

Dia mengatakan pemerintah perlu melakukan sosialisasi sebelum memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sampah agar tidak merugikan produsen. "Setidaknya produsen diinformasikan terlebih dahulu, kriteria kemasan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang," katanya.

Menurut dia, produsen harus dijelaskan terlebih dahulu terkait kemasan yang dapat dipergunakan kembali (reuse) dan didaur ulang (recycle). Pemerintah, katanya, perlu menjelaskan tugas produsen dalam mendaur ulang sampah dan pengolahan sampah. Ketua Forum Lintas Asosiasi Nasional (LAN) Franky Sibarani mengatakan keberatan pengusaha terkait regulasi sampah terkait kewajiban produsen menarik kembali sampah hasil produksi. Luther Kembaren